

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Rembang

Halaman 9 dan 11

Prihatin Belum Mendapat Opini WTP

REMBANG - Pemkab Rembang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Kondisi itu menjadi keprihatinan mendalam bagi Bupati Rembang Abdul Hafidz. Saat memimpin apel pagi beberapa waktu lalu, Bupati Hafidz menyebutkan, kondisi ini menjadi renungan bersama agar ke depan benar-benar kabupaten Rembang bisa mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

"Terus terang saja saya merasa malu ketika BPK memberikan Opini kepada Pemkab Rembang karena tidak mendapatkan opini WTP. Ini renungan dan harus kita pahami bersama agar kede- ▶ *Baca PRIHATIN... 11*

pan benar-benar kabupaten Rembang bisa mendapatkan WTP dari BPK," ujarnya.

Menurut Bupati Hafidz, untuk mendapatkan opini WTP tidaklah mudah. Sebab pekerjaan yang dihadapi sangat kompleks, utamanya terkait aset pemerintah daerah.

Karena itu, Bupati Hafidz meminta kepada semua jajarannya utamanya bendahara pengeluaran, pembantu bendahara atau pendapatan aset untuk bersama-sama melakukan inovasi.

"Ke depan aset bisa termonitor dengan baik, dari sisi regulasi maupun kondisi ada di lapangan bisa terintegrasi sebuah kegiatan dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Sementara dari beberapa

evaluasi dan monitoring, lanjut Bupati Hafidz, terpantau pula merosotnya kinerja ASN. Pihaknya juga perlu memetakan, apakah disebabkan ada faktor tertentu, misalnya kesejahteraan ASN kurang.

Jika hal ini menjadi permasalahan dan menjadi ukuran, maka pihaknya siap berkoordinasi dengan jajarannya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Ada beberapa fakta yang kami evaluasi meskipun tidak bisa dibenarkan, tetapi saya punya feling apakah faktor kesejahteraan PNS masih kurang, ini menjadi keprihatian saya. Kalau ini yang terjadi maka kami akan koordinasi dengan Jajarannya bagaimana PNS bisa sejahtera, sehingga bisa gesit dalam bekerja," tandasnya. (sov/rif)